

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Intisari	viii
Abstract	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian	14
Bab II Tinjauan Pustaka	21
A. Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat	21
B. BPK dan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	28
C. Dana Hibah dan Bansos Pada Pemerintah Daerah	30
Bab III Metode Penelitian	48
A. Jenis dan Sifat Penelitian	48
B. Data Penelitian	49
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	52
D. Analisis Data	53
E. Jalannya Penelitian	54
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	55
A. Bentuk Penyimpangan Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Beberapa Pemerintah Daerah	56
1. Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 18/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks	57
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2341 K/Pid.Sus/2016	59

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1609 K/Pid.Sus/2016	64
4. Bentuk Manipulasi Penyimpangan Dana Hibah	70
a. Pemotongan Dana Hibah dan Bansos yang telah Terealisasi dari APBD Tidak Sesuai ketentuan, Sehingga Tidak Diterima oleh Penerima Hibah dan Bansos Sebagian atau Seluruhnya	70
b. Intervensi dalam Proses Evaluasi atas Permohonan Dana Hibah dan Bansos dari Masyarakat	75
c. Penggunaan Dana Hibah dan Bansos Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Pribadi	82
d. Tidak Mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana Hibah dan Bansos	86
B. Langkah yang Telah dan Masih Perlu Dilakukan Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK untuk Meminimalisir Penyimpangan Dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos	92
1. Penilaian Risiko Bisnis Belanja Hibah dan Bansos ketika Pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan	94
2. Penyusunan Rekomendasi Temuan Pemeriksaan yang Menyelesaikan Permasalahan	107
3. Penyusunan Pendapat BPK yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan terkait Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	113
Bab V Penutup	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	119
Daftar Pustaka	123
Lampiran	